

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DESA PADA DESA
PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN**

*Disusun dan diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk mendapatkan
gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau*



OLEH :

NAMA : RESITA ELVI RISDIANTI PUTRI

NPM : 155311015

JURUSAN AKUNTANSI S-1

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DESA PADA DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN

OLEH:
Resita Elvi Risdianti Putri

Penelitian dilakukan untuk mengetahui kesesuaian penerapan akuntansi keuangan pada Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dengan prinsip akuntansi berterima umum. Sumber data yang diperoleh untuk proses pembuatan skripsi ini yang bersumber dari catatan, dokumentasi, serta wawancara dengan pihak Desa Pongkar untuk membantu proses penelitian skripsi ini. Hasil penelitian menyatakan bahwa dasar pencatatan yang diterapkan di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun adalah berbasis kas. Proses akuntansi Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun belum diterapkan sesuai dengan siklus akuntansi yang benar karena Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun tidak membuat Buku Besar, Neraca Saldo, dan Laporan Kekayaan Milik Desa. Penerapan akuntansi pada Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun belum sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

Kata Kunci: Akuntansi, Desa.

ABSTRACT**ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE ACCOUNTING
IN PONGKAR VILLAGE, KECAMATAN TEBING, KARIMUN
DISTRICT****By :****Resita Elvi Risdianti Putri****155311015**

The study was conducted to measure the appropriateness of the accounting application in the Pongkar Village, Tebing District, Karimun Regency with general accounting principles. Sources of data obtained for the process of making this thesis are sourced from notes, documentation, and interviews with the Pongkar Village to assist the thesis research process. The results of the study stated that the basis for recording which was applied in the Pongkar Village, Tebing District, Karimun Regency was cash-based. The accounting process in Pongkar Village, Tebing District, Karimun Regency has not been implemented according to the correct accounting cycle because Pongkar Village, Tebing District, Karimun Regency has not made a Ledger, a Balance Sheet, and a Village Property Report. The application of accounting in the Pongkar Village, Tebing District, Karimun Regency is not in accordance with general accounting principles.

Keywords: Accounting, Village

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur Kehadirat Allah SWT, Karena dengan rahmat, petunjuk dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI DESA PADA DESA PONGKAR KECAMATAN TEBING KABUPATEN KARIMUN”**, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.

Penulis percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan izin dari ketetapan Allah SWT, namun penyusunan skripsi ini tidak lepas dari orang-orang disekitar penulis yang begitu banyak memberikan bantuan serta dukungan. Maka pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr.Firdaus Ar SE., M.Si, Ak., CA Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
2. Ibu Hj. Siska, SE, M.Si,AK, CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Riau.
3. Bapak Drs. H. Abrar., M.Si, Ak., CA Selaku Pembimbing 1 yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan ilmunya dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam pembuatan skripsi.

4. Ibu Alfurkaniati, SE.,M.Si.,AK.,CA Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan ilmunya dalam membimbing dan mengarahkan saya dalam pembuatan skripsi ini.
5. Bapak Ibu Dosen yang telah mendidik dan membantu dari awal perkuliahan hingga penyelesaian perkuliahan.
6. Bapak Kepala dan beserta Staf/Pengurus Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang telah membantu memberikan data-data beserta informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian.
7. Kepada ibu Elvi Suprpto, bapak Slamet Risdianto, dan kedua adik saya Santika Della Risdianti Putri dan Excel Putra Vidiyanto tercinta yang selalu sabar dan setia memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Secara khusus untuk suami tercinta Jaya Sainofi dan anak tercinta Aiza Naadhira Wijaya yang selalu sabar dan setia memberikan dorongan kepada penulisan dalam menyelesaikan skripsi.
9. Rekan – rekan mahasiswa Program Studi Strata Satu (S1) Akuntansi Universitas Islam Riau dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu hingga selesainya skripsi ini.

Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, oleh karena itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan terkait dengan penelitian ini.

Pekanbaru, 07 Desember 2020

Resita Elvi Risdianti Putri



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
ABSTRAK.....	
BAB 1 PENDAHULUAN.....	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS.....	
2.1. Telaah Pustaka	
2.1.1 Pengertian Desa.....	9
2.1.2 Pemerintahan Desa.....	9
2.1.3 Tugas atau Kewenangan Pemerintahan Desa.....	10
2.1.4 Akuntansi Desa dan Keuangan Desa.....	11
2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).....	12
2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa.....	13
2.1.7 Siklus Akuntansi Keuangan Desa.....	14

2.1.8 Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa.....	15
2.1.9 Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	15
2.1.10 Pengertian Akuntansi.....	17
2.1.11 Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa.....	17
2.2 HIPOTESIS.....	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	
3.1 Desain Penelitian.....	21
3.2 dan Lokasi Penelitian.....	21
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	22
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	22
3.5 Teknik Analisis Data.....	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
4.1 Gambaran umum Objek Penelitian.....	
4.1.1 Sejarah Singkat Desa.....	24
4.1.2 Visi dan Misi.....	25
4.1.3 Struktur Organisasi.....	26
4.2 Hasil Penelitian Dan Pembahasan	
4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi.....	28
4.2.2 Proses Akuntansi Pada Desa.....	28
BAB V PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	42

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi adalah sistem atau alat penyedia informasi data keuangan yang dimulai dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, penguraian, penggabungan, pengikhtisaran, dan penyajian data keuangan dengan cara-cara tertentu agar menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

Akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting untuk pengambilan keputusan dimasa mendatang. Dengan ilmu akuntansi yang baik dapat menyediakan informasi yang digunakan untuk melakukan tindakan. Fungsi dari tindakan tersebut untuk melakukan perencanaan, pengawasan, dan menghasilkan keputusan bagi pimpinan organisasi yang bermanfaat baik oleh pihak internal maupun eksternal.

Prinsip akuntansi merupakan dasar atau pedoman dalam melaksanakan proses akuntansi. Prinsip akuntansi digunakan untuk membuat laporan keuangan menjadi akurat yang dapat menghindari dari kesalahan dalam menerapkan unsur-unsur akuntansi dalam laporan keuangan. Prinsip dan konsep akuntansi dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian atas praktek akuntansi sehari-hari.

Akuntansi keuangan desa pada dasarnya belum memiliki Standar Akuntansi Khusus yang mengaturnya. Oleh sebab itu Kompartemen Akuntansi

Sektor Publik (IAI-KASP) menerbitkan Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa untuk pedoman pengelolaan keuangan desa yang dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan pemahaman bagi pemerintah desa dalam menyusun laporan keuangan secara benar.

Tahapan siklus akuntansi merupakan proses akuntansi yang mengumpulkan dan mengolah data berdasarkan aktivitas transaksi. Menurut IAI-KASP 2015 Tahap Pencatatan dimulai dari bukti transaksi yang ada dilakukan pencatatan ke dalam buku yang sesuai.

Pencaatan selanjutnya adalah Tahap Penggolongan yang mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan kredit.

Kemudian tahap Pengiktisan, pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa merupakan saldo akhir akun yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu, berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan.

Tahap Pelaporan merupakan tahapan akhir yang membuat, (1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang berisi jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu. (2) Laporan Kekayaan Milik Desa yang berisi posisi asset lancar, asset tidak lancar, dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

Berdasarkan IAI-KASP pasal 93 ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi: (1) Perencanaan, Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. (2) Pelaksanaan, penerimaan dan pengeluaran desa untuk pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa disertai dengan bukti yang lengkap dan sah. (3) Penatausahaan, Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap ada penerimaan dan pengeluaran menggunakan Buku Kas Umum, Buku Pembantu Pajak, dan Buku Bank. (4) Pelaporan, Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa semester pertama. (5) Pertanggungjawaban, Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran berupa Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan. (6) Pembinaan dan Pengawasan, Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.

Desa Pongkar merupakan desa yang terletak di Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang beralamat di Jl. Brigjen Katamso merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertugas membantu pemerintah dalam permasalahan diBidang Pelayanan Masyarakat dan bertanggungjawab menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan yang terdiri dari pendapatan belanja dan pembiayaan APBDesa kepada Bupati/ Walikota setiap akhir tahun anggaran yang merujuk pada IAI.

Alasan pemilihan objek penelitian ini karena belum ada yang melakukan penelitian di Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun. Desa Pongkar memiliki keindahan alam dan sumber daya alam seperti hutan, perkebunan, granite, kelautan, gunung jantan dan objek wisata pantai pongkar, pantai ketam, alam air terjun. Desa Pongkar berkembang dengan pesat yang dapat dilihat dari segi kemajuan dibidang pembangunan, bidang kesehatan, bidang ketertiban, bidang olahraga dan bidang sosial budayawan kedaulatan politik masyarakat. Kemajuan tersebut terlihat dari salah satu bidang yaitu dalam bidang pembangunan, didalam desa membangun jalan untuk akses masyarakat desa dan akses menuju objek wisata.

Dengan tumbuhnya perkembangan ini perlu diperhatikan terkait dengan pelaporan keuangannya karena laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban dari pelaksana desa, laporan keuangan merupakan hal yang terpenting tetapi Desa Pongkar berbeda dengan desa-desa lainnya. Hasil wawancara dan dokumen yang di perlihatkan akuntansinya belum lengkap, karena sistem akuntansi yang diterapkan belum sepenuhnya dipahami oleh bendahara desa yang belum memaksimalkan dari fungsi akuntansi sebenarnya untuk menunjang efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Ternyata di Desa Pongkar ini masih memakai sistem manual sebab bagi bendahara desa masih sulit untuk memahami akuntansi desa.

Dalam penyusunan laporan keuangan pada Desa Pongkar berbasis pada Basis Kas (*cashbasis*). Basis kas merupakan teknik pencatatan transaksi dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi

anggaran yang diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas umum negara atau daerah oleh entitas pelaporan.

Proses pengelolaan keuangan pada Desa Pongkar pertama kali membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), setelah anggaran disahkan dan dilaksanakan Bendahara Desa melakukan pencatatan atas transaksi yang timbul dari Desa kemudian dibukukan.

Bukti transaksi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dibukukan kedalam Buku Kas Umum, Buku Bank Desa, Buku Pembantu Pajak. Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran secara tunai (*cash*) ataupun kredit (lampiran 1). Buku Bank untuk membantu buku kas umum serta mencatat transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran melalui Bank (lampiran 2). Buku Pembantu Pajak untuk mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipunggut atas transaksi belanja yang dilakukan dalam Buku Pajak pada kolom penerimaan yang didasarkan pada bukti kwitansi ataupun nota (lampiran 3).

Pada akhir tahun Bendahara Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban APBDesa terdiri atas jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan untuk tahun anggaran tertentu (lampiran 4).

Pada Buku Kas Umum di bulan Februari, Desa tidak melakukan pencatatan atas transaksi sehingga pada Buku Kas Umum tertera Nihil. Transaksi di bulan Januari dan Februari di catat pada bulan Maret, pencairan Dana Desa tahun 2018 dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama adalah 20 persen, tahap ke dua 40 persen dan tahap ketiga sebesar 40 persen. Keterlambatan pencairan Dana Desa

disebabkan Desa belum menyelesaikan penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).

Dalam proses akuntansi yang dilakukan oleh Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun terdapat permasalahan yaitu Desa tidak membuat Buku Besar dan Neraca Saldo. Di Desa Pongkar berbeda dengan desa-desa lain yang tidak membuat Laporan Kekayaan Milik Desa. Namun aset yang dimiliki Desa dicatat kedalam Buku Inventaris (lampiran 5).

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk membahas mengenai **Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dikemukakan sebuah rumusan masalah yakni Bagaimana Penerapan Akuntansi Desa Pada Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun telah diterapkan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berterima Umum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian akuntansi yang telah diterapkan oleh Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dengan prinsip Akuntansi Berterima Umum.

1.4 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang dilakukannya penelitian ini, terdapat manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian ini berharap menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan pandangan kepada calon peneliti selanjutnya mengenai Penerapan Akuntansi Desa Pada Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan/referensi bagi peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak – pihak yang terkait pada Akuntansi Desa.

4. Bagi masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pertanggungjawaban dan sarana informasi atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pihak desa untuk pengambilan keputusan.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang diterapkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dalam bab ini menjelaskan mengenai telaah pustaka yang berhubungan dengan penulisan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, menguraikan, menganalisis dan mengevaluasi penelitian tersebut.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat disampaikan terkait dengan hasil penelitian yang dilakukan.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

2.1.1 Pengertian Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 1 poin 1 adalah:

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Rosalinda (2014) Desa adalah:

Bagian dari sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diakui otonominya. Melalui pemerintahan Kepala Desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa adalah keaneka ragaman, partisipasi, otonomiasli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soetardjo Kartohadi koesoemo Desa adalah:

Suatu kesatuan hukum dimana bermukim suatu masyarakat yang berkuasa dan masyarakat tersebut mengadakan pemerintah sendiri.

2.1.2 Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Pemerintahan desa sebagai berikut:

Pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa desa, hak asal usul dan adat istiadat dalam desa.

Menurut Eni Surasih (2016:23) Pemerintahan desa merupakan:

Pembagian dipemerintahan nasioanal untuk penyelenggaraannya ditujukan pada wilayah pedesaan. Pemerintahn desa adalah bagian suatu proses usaha-usaha masyarakat yang ada di desa bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di suatu wilayah.

2.1.3 Tugas atau Kewenangan Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26, Kepala Desa memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan pada desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pemerintahan desa kepala desa merupakan pemegang kekuasaan yang memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 1) Pemimpin dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Mempunyai kekuasaan untuk Pengelolaan Keuanan dan Aset Desa
- 3) Mentakan Peaturan Desa
- 4) Menetapkan AnggaranPendapatan dan Belaja Desa

PTPKD membantu kepala desa dengan keputusan kepala desa yang berasal dari unsur perangkat desa dalam mengelola keuangan desa. Perangkat desa terdiri dari sekertaris desa, kepala seksi, bendahara desa.

Menurut Permendagri 113 tahun 2014 sekertaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

- 2) Menyusun perancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- 5) Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 Bendahara desa dijabat oleh staf keuangan yang mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, membayar dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.1.4 Akuntansi Desa dan Keuangan Desa

Menurut Sujarweni V.Winarta (2015:17) Akuntansi Desa adalah Sebuah proses pencatatan transaksi pada suatu Desa, dibuktikan dengan nota nota setelah dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan akan menghasilkan suatu informasi berupa laporan keuangan yang digunakan oleh pihak-pihak berhubungan dengan Desa. Informasi akuntansi desa digunakan oleh pihak-pihak sebagai berikut:

1. Pihak Internal

Pihak internal yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara, dan Kepala Urusan/Kepala Seksi yang berada dalam struktur organisasi desa.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Bertugas dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa seperti Pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota serta pihak lainnya seperti RT/RW.

3. Pemerintah

Pemerintah bertugas mengingatkan perangkat desa mengenai anggaran desa baik berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa melalui transfer bagi hasil dan bantuan keuangan.

4. Pihak Lainnya

Misalnya Lembaga Swadaya Desa, RT/RW, dan sebagainya.

Menurut Permendagri Nomor 6 Tahun 2014 keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan barang dalam rangka penyelenggara pemerintahan desa. Pengelolaan keuangan desa didasarkan pada azas-azas transparan akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin dalam penggunaan anggaran desa.

2.1.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 APBDesa adalah rencana yang disetujui oleh DPRD mengenai keuangan tahunan pemerintah daerah dan ditetapkan dengan peraturan Daerah dalam masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Proses penyusunan APBDesa terdiri atas:

1) Anggaran Pendapatan

- a. Meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan penerimaan lainnya yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Dana Perimbangan, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.

c. Pendapatan yang sah seperti Dana Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah dan Pendapatan lain-lainnya.

2) Anggaran Belanja

Anggaran yang digunakan untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah.

3) Pembiayaan

Penerimaan yang harus dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

2.1.6 Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan (IAI-KASP2015: 2-5) pengelolaan keuangan desa meliputi pencatatan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang dihitung dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara setiap tahun anggaran yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah.

2.1.7 Siklus Akuntansi Keuangan Desa

Tahapan siklus akuntansi menurut IAI-KASP Tahun 2015 tahapan berupa:

1. Tahap Pencatatan

Dilakukan pencatatan kedalam buku yang sesuai dengan bukti transaksi.

2. Tahap Penggolongan

Mengelompokkan catatan bukti transaksi ke dalam kelompok buku besar sesuai dengan nama akun dan saldo-saldo yang telah dicatat dan dinilai dalam kelompok debit dan kredit.

3. Tahap Pengikhtisaran

Pembuatan neraca saldo dan kertas kerja. Laporan Kekayaan Milik Desa yang berisi saldo akhir yang telah dicatat di buku besar utama dan buku besar pembantu. Laporan Kekayaan Milik Desa berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun kedalam debit dan kredit yang jumlah kolom debit dan kreditnya harus sama atau seimbang sehingga perlu pemeriksaan dari waktu ke waktu untuk menghindari salah pencatatan.

4. Tahap Pelaporan

Tahap akhir dari siklus akuntansi

- a. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang berisikan jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja dan pembiayaan dari pemerintah desa yang bersangkutan untuk tahun anggaran tertentu.
- b. Membuat Laporan Kekayaan Milik Desa yang berisi aset lancar, aset tidak lancar dan kewajiban pemerintah desa per 31 Desember tahun tertentu.

2.1.8 Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Desa

Menurut Halim Abdul dan Muhammad Syam Kusufi (2012) adalah:

1. Basis Kas (cash basis)

Teknik pencatatan transaksi dimana uang benar-benar diterima ataupun dikeluarkan.

2. Basis Akrua (accrual basis)

Teknik pencatatan transaksi pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhatikan kas/setara kas diterima/dibayar yang digunakan dalam pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.

3. Basis Kas Modifikasian (modified accrual basis)

Transaksi akan dicatat selama tahun anggaran serta melakukan penyesuaian di akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis Akrua Modifikasian (modified accrual basis)

Proses mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas pada transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi.

2.1.9 Pelaporan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa

IAI-KASP (2015) menjelaskan tahap akhir dari siklus akuntansi adalah membuat laporan keuangan yang bersumber dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur dan dasar penyusunan laporan keuangan.

Kewajiban Kepala desa menyampaikan laporan secara periodik semesteran dan tahunan kepada Bupati/Walikota dan BPD. Rincian laporan sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati/Walikota melalui camat:

1. Laporan semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDesa.

- a. Laporan Semester Pertama, laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang dibandingkan dengan target dan anggaran selama 1 semester yang disampaikan paling lambat bulan Juli tahun berjalan.
 - b. Laporan Semester Akhir, merupakan akumulasi yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan akhir tahun yang disampaikan paling lambat akhir Januari tahun berikutnya.
2. Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.
 3. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa.
 - a. Semester 1 yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
 - b. Semester II yang disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan Kekayaan Milik Desa menggambarkan akumulasi kekayaan milik desa yang berisi posisi kekayaan dan hutang milik pemerintah desa per tanggal tertentu yang disajikan secara komparatif dengan tahun sebelumnya untuk melihat kenaikan/penurunannya.

2.1.10 Pengertian Akuntansi

Menurut IAI-KASP Tahun 2015 Akuntansi adalah:

Suatu kegiatan dalam mencatat data keuangan sehingga menjadi suatu informasi yang berguna bagi pemakainya.

Menurut Kieso, et al (2016:2) Akuntansi adalah Tiga aktivitas yang mendasar yakni identifikasi, pencatatan dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi sebuah organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Perusahaan mengidentifikasi peristiwa ekonomi sesuai dengan aktivitas dan mencatat peristiwa tersebut untuk menyediakan catatan kegiatan keuangan. Pencatatan dilaksanakan secara sistematis, kronologis dalam satuan mata uang. Pada akhirnya pengkomunikasian informasi kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan akuntansi atau laporan keuangan.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk (2016:3) Akuntansi merupakan suatu sistem informasi keuangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan.

2.1.11 Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa

Menurut IAI-KASP 2015 sebagai berikut:

a. Buku Besar

Merupakan transaksi yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan pada desa.

b. *General cashbook*

Digunakan untuk mencatat kegiatan penerimaan dan pembayaran secara tunai maupun kredit dan digunakan untuk mencatat mutasi booming bank/ kesalahan pembukuan.

c. Buku Kas Harian Pembantu

Buku yang digunakan untuk transaksi pembayaran dan penghasilan terkait dengan uang tunai.

d. Buku Kas Pembantu Kegiatan

Untuk mencatat penerimaan yang diperoleh dari bendahara desa (panjar) atau dari masyarakat (swadaya) sedangkan untuk pengeluaran dicatat oleh pelaksana kegiatan atau belanja-belanja yang telah dilaksanakan baik belanja barang, jasa maupun belanja modal. Saldo yang masih tersisa dan berada dipelaksana kegiatan maka dilakukan penyetoran kepada bendahara desa. Semua penerimaan dan pengeluaran didukung dengan bukti yang sah dan lengkap.

e. Buku Pembantu Rincian Pendapatan

Merupakan buku tambahan yang tidak ada didalam IAI-KASp 2015, buku ini digunakan untuk mengcrosscheck dan mengelompokkan rincian pendapatan yang diterima agar saat menyusun Laporan Realisasi APBDesa tidak mengalami kesulitan.

f. Register Surat Permintaan Pembayaran

Merupakan dokumen tambahan yang tidak ada dalam IAI-KASP 2015, yang digunakan untuk alat kontrol bagi sekretaris desa terhadap SPP yang

diajukan dari pelaksana kegiatan. Sekretaris desa mengetahui jumlah SPP yang sedang diproses secara tingkat kemajuannya apakah sudah diverifikasi Sekdes, disetujui Kades atau sudah dibayarkan oleh Bendahara Desa.

g. Lembar Kerja

Kertas kerja atau neraca lajur telah disahkan untuk memfasilitasi pelaporan, laporan pertanggungjawaban atas realisasi anggaran desa dan laporan asset desa, angka-angka yang disajikan dalam lembar kerja diperoleh dari neraca semua buku catatan dengan memperhitungkan kemungkinan koreksi terhadap penyaji angka-angka ini.

h. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa

Laporan ini menyajikan pendapatan, pengeluaran, transfer dan pembiayaan. Laporan pencapaian anggaran memberikan informasi tentang pembuatan anggaran dan pendapatan LRA, Pengeluaran, transfer surplus/deficit LRA, entitas pelaporan pendanaan. Informasi ini berguna untuk melaporkan penggunaan dalam menilai keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi, dan komitmen akuntabilitas dan pelaporan anggaran karena memberikan informasi berikut:

1. Pertama, informasi tentang sumber alokasi dan sumber daya ekonomi
2. Kedua, informasi tentang realisasi anggaran berguna dalam hal efesiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

i. Laporan Kepemilikan Desa

Merupakan laporan milik desa yang berkaitan dengan perbedaan antara asset milik desa dan jumlah total kewajiban desa pada tanggal 31 Desember setiap tahun.

1.2 HIPOTESIS

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan dan telah pustaka maka penulis kemukakan hipotesis sebagai berikut: **Penerapan Akuntansi Desa Pada Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berterima umum.**



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011:73), penelitian deskriptif kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variable-variable yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satu perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor proses pencatatan keuangan Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang hasil penelitiannya sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa ada rekayasa pada data keuangan.

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Karimun dimana pengambilan data mengenai Analisis Penerapan Akuntansi Desa Pada Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, yang beralamat di Jl. Brigjen Katamsa Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Untuk jenis data yang dikumpulkan oleh penulis di dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dilapangan oleh peneliti atau yang bersangkutan. Jenis data primer ini antara lain data yang diperoleh dari Kepala Desa Pongkar, Sekretaris Desa Pongkar dan Bendahara Desa Pongkar.

2. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada atau media perantara. Sumber data sekunder ini berupa laporan keuangan desa Pongkar dan struktur organisasi desa pongkar.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Teknik Domuntasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari menganalisis dan melihat catatan-catatan yang dimiliki pemerintah desa. Teknik ini dilaksanakan dengan membuat *copy* atau pencatatan dari arsip resmi atau asli pemerintah desa.
2. Teknik Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka dan tanya jawab antara peneliti dan narasumber. Wawancara dilakukan dengan bagian keuangan/bendahara desa untuk mendapatkan

informasi dan permasalahan sehubungan dengan akuntansi keuangan Desa Pongkar.

3.5 Teknik Analisis Data

Berdasarkan data yang terkumpul oleh peneliti dari Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun, kemudian data dikelompokkan sesuai dengan sub pembahasan dan akan dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif adalah membandingkan antara data dari Desa Pongkar dengan berbagai teori yang mendukung pembahasan dari hasil perbandingan tersebut terdapat kesimpulan untuk membuktikan kebenaran hipotesis peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah dan Gambaran Umum Desa Pongkar

Desa Pongkar adalah salah satu Desa yang baru terbentuk yang merupakan hasil pemekaran Kelurahan Tebing yang berdasarkan Perda Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja.

Desa Pongkar sudah menjadi tempat pemukiman penduduk masyarakat melayu serta suku bangsa lainnya karena posisinya berdekatan dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura. Desa Pongkar sudah menjadi kawasan penting sejak pemulaan Kerajaan Riau yang berpusat di Pulau Bintan, bahkan perkiraan asal Desa Pongkar lebih tua dari Termasik atau Singapura.

Seiring dengan perkembangan maka terbitlah Perda Kabupaten Karimun Nomor 16 Tahun 2001. Kabupaten dimekar menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, 19 (sembilan belas) Kelurahan dan 25 (dua puluh lima) Desa. Sebelum Pongkar menjadi Desa, Pongkar terdiri dari 1 (satu) Rw dan 4 (empat) Rt, dengan hasil pemekaran maka Desa Pongkar menjadi 2 (dua) Dusun, 4 (empat) Rw dan 10 (sepuluh) Rt. Pada akhir Tahun 2009 telah dimekarkan lagi menjadi 2 (dua) Dusun, 4 (empat) Rw dan 11 (sebelas) Rt dengan jumlah penduduk pada akhir Tahun 2016 sebanyak 2598 Jiwa, terdiri dari laki-laki 1339 jiwa dan perempuan 1259 jiwa.

Dengan jumlah penduduk 2598 jiwa yang mayoritas Penduduk Desa Pongkar bersuku Melayu dan Beragama Islam yang mata pencariannya sebagai

Nelayan, petani, Buruh Harian dan Karyawan Swasta dengan sumber Daya Alam yang dimiliki berupa Hutan, Perkebunan, Granite, Kelautan, dan Objek Wisata Pantai dan Alam Air Terjun. Desa Pongkar berada di sebelah Barat Pulau Karimun, tepatnya di ujung Pulau Karimun yang secara Georafis berbatas wilayah:

- Sebelah Utara : dengan Selat Malaka dan Kabupaten Meranti
 Sebelah Selatan : dengan Kelurahan Pamak/ Kelurahan Darussalam
 Sebelah Barat : dengan Darussalam /Kelurahan Pasir Panjang
 Sebelah Timur : dengan Selat Malaka/ Perbatasan Singapura

Dan mempunyai Luas Wilayah :

No	Wilayah	Darat	Laut	Total
1	Desa Pongkar	44,03 Ha	265,18 Ha	309,21

Desa Pongkar juga memiliki Pulau terluar yakni Pulau Karimun Anak dan Tokong Hiu Kecil yang berbatas langsung dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura.

4.1.2 Visi dan Misi Desa Pongkar

1. Visi

Mewujudkan Masyarakat Desa Pongkar yang Sehat, Sejahtera, dan Maju serta Berbudaya dengan berlandaskan Iman dan Taqwa.

2. Misi

- a. Mengembangkan potensi Pertanian, Perikanan, dan Kelautan serta Home Industri yang berbasis ekonomi kerakyatan.

- b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa serta mempunyai semangat kerja yang tinggi serta berjiwa sosial dan bergotong royong.
- c. Meningkatkan kesehatan masyarakat Desa Pongkar
- d. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang merata yang dapat dirasakan semua kalangan
- e. Mengembangkan Seni dan Budaya serta Objek Wisata untuk pertumbuhan ekonomi yang merata.

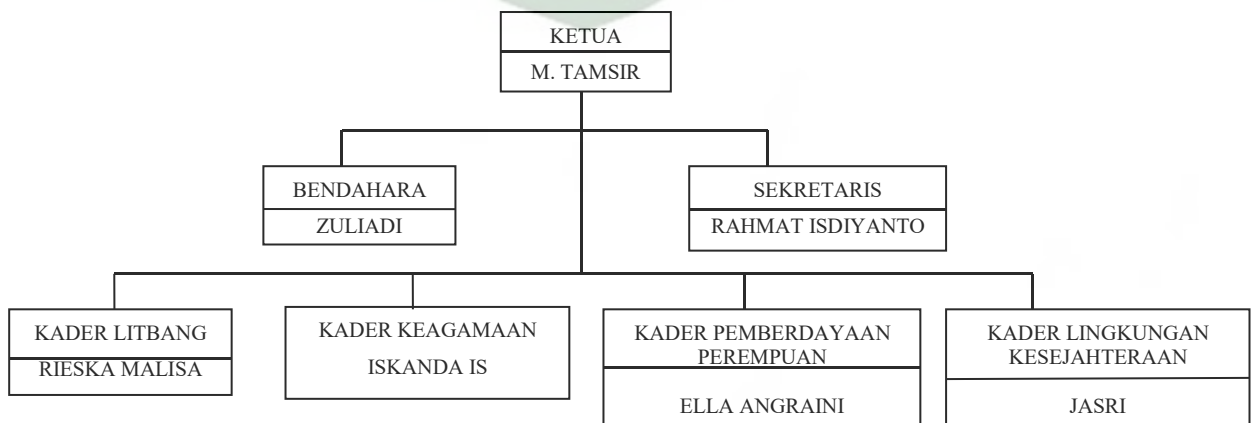
MOTTO

Melayani Masyarakat dengan :

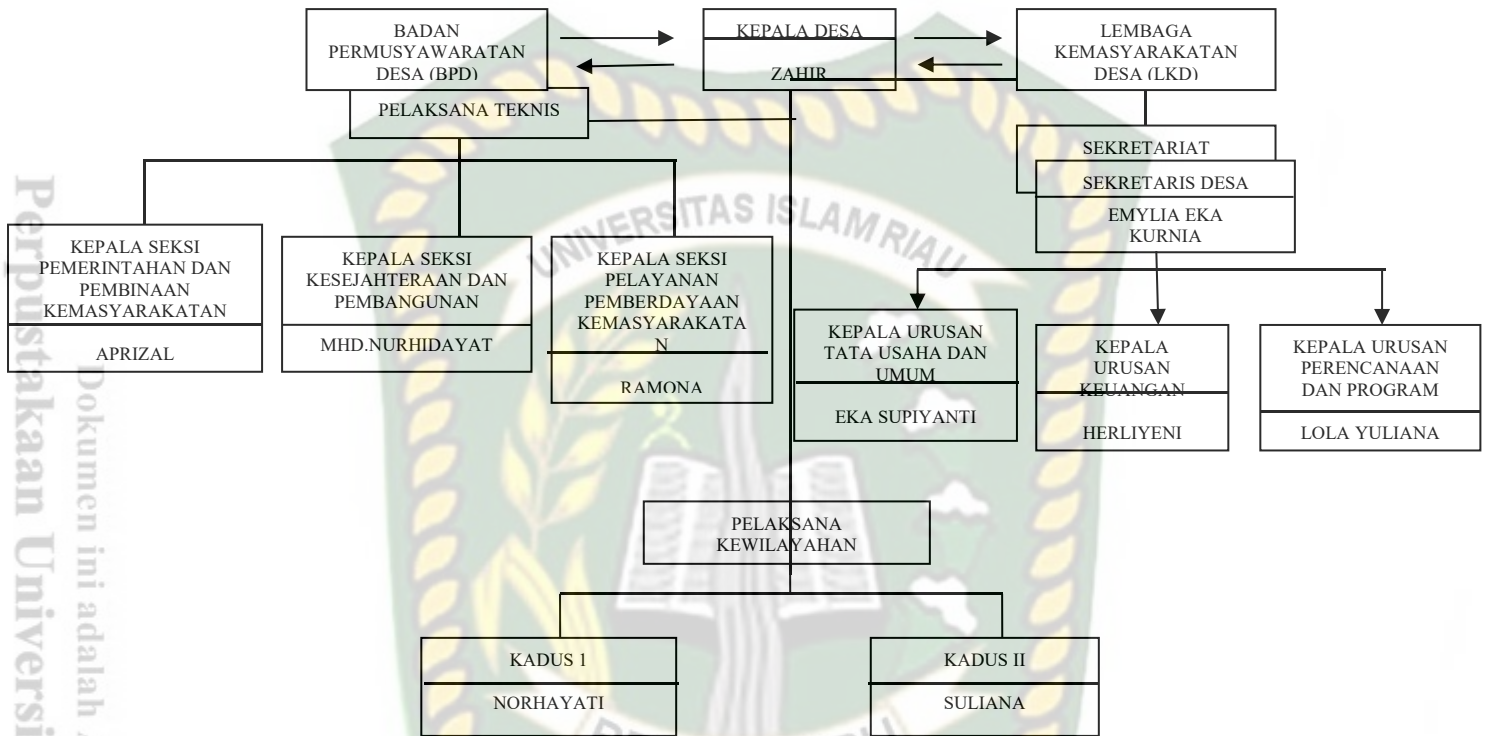
- a. Ramah
- b. Mudah
- c. Beretika

4.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Pongkar

Gambar IV.1
STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMERDAYAAN MASYARAKAT (LPMD)
DESA PONGKAR
KECAMATAN TEBING – KABUPATEN KARIMUN



Gambar IV.2
STRUKTUR PEMERINTAHAN
KANTOR DESA PONGKAR
KECAMATAN TEBING – KABUPATEN KARIMUN



4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan landasan teori yang telah dijelaskan di BABII dan tinjauan Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pada Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun terhadap Prinsip Akuntansi Berterima Umum, maka pada bab V ini penulis menjelaskan bagaimana kesesuaian Penerapan Akuntansi Keuangan Desa Pongkar terhadap Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

4.2.1 Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi

Dalam sistem pencatatan Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun menggunakan Sistem *Single Entry*. Desa melakukan pencatatan secara (*cash basis*) dimana pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran yang diakui pada saat kas keluar dan kas diterima. Penerimaan kas dicatat sebagai kas masuk sedangkan pembayaran kas dicatat sebagai kas keluar didalam Buku Kas Umum (BKU) pencatatan didasarkan oleh bukti transaksi berupa nota atau kwitansi yang sah.

4.2.2 Proses Akuntansi pada Desa

1. Tahap Pencatatan

Tahap ini merupakan langkah awal dalam proses akuntansi Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun yang berawal dari bukti-bukti transaksi yang selanjutnya dilakukan pencatatan kedalam Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak.

a. Buku Kas Umum (BKU)

Setiap transaksi yang terjadi pada Desa baik itu penerimaan atau pengeluaran secara tunai atau kredit dicatat didalam Buku Kas Umum, penerimaan kas dicatat pada kolom penerimaan dan pengeluaran kas dicatat pada

kolom pengeluaran. Berikut ini penyajian Buku Kas Umum Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun:

Tabel IV.3
Buku Kas Umum
Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
Tahun Anggaran 2018

No	Tanggal	Rek	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	01/10/2018		Tarik gaji Pemdes bulan September 2018	23.280.000	
2	01/10/2018		Pembayaran gaji Pemdes bulan September sesuai SPP No.39/TPK/PKR/IX/2018		23.280.000
3	12/10/2018		Tarik Operasional BPD bulan Juli dan Agustus 2018	1.528.000	
4	12/10/2018		Pembayaran Operasional BPD bulan Juli dan Agustus sesuai SPP No.40/TPK/PKR/X/2018		1.528.000
5	12/10/2018		Tarik Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga (Futsal)	6.906.443	
6	12/10/2018		Pembayaran Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga (Futsal)		6.906.443

Sumber: Buku Kas Umum Desa Pongkar

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun telah membuat Buku Kas Umum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

b. Buku Bank

Buku Bank digunakan untuk membantu Buku Kas Umum dan mencatat transaksi terkait dengan penerimaan maupun pengeluaran Desa secara transfer atau tunai melalui Bank/Uang Bank. Berikut ini penyajian Buku Bank Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun :

Tabel IV.4
Buku Bank
Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
Tahun Anggaran 2018

No	Tanggal	Uraian Transaksi	Bukti	Pemasukan		Pengeluaran			Saldo
				Setoran (Rp)	Bunga Bank (Rp)	Penarikan (Rp)	Pajak (Rp)	B. Administrasi (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Saldo bulan sebelumnya		1.391.661.646	6.216.780	1.038.631.694	1.243.360	58.500	486.311.262
1	01/10/2018	Tarik Gaji Pemdes untuk bulan September 2018				23.280.000			463.031.262
2	03/10/2018	Terima dari BUD-SP2D ADD Ls Tahap II 2018		350.952.360					813.983.622
3	12/10/2018	Tarik Kegiatan Pembinaan Olahraga (Futsal)				6.906.443			807.077.179
4	12/10/2018	Tarik Operasional BPD bulan Juli dan Agustus				1.528.000			805.549.179
5	16/10/2018	Terima dari BUD-SP2D DD Ls Tahap II 2018		319.654.160					1.125.203.339
6	24/10/2018	Tarik Operasional Pemdes Tahap III 2018				27.215.000			1.097.988.339
7	24/10/2018	Tarik Kegiatan Pembangunan Terali Tribun				3.955.000			1.094.033.339
8	24/10/2018	Tarik Kegiatan Pengecatan Tugu Batas				2.692.200			1.091.341.139
9	26/10/2018	Biaya administrasi							1.091.334.639
10	31/10/2018	Bunga Bank			1.790.247			6.500	1.093.124.886
11	31/10/2018	Pajak					358.050		1.092.766.836
									1.092.766.836
		Total Transaksi Bulan ini		670.606.520	1.790.247	65.576.643	358.050	6.500	1.092.766.836
		Total Transaksi Kumulatif		2.062.268.166	8.007.027	1.104.208.337	1.601.410	65.000	1.092.766.836

Sumber: Buku Bank Desa Pongkar

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun telah membuat Buku Bank Desa sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

c. Buku Pajak

Buku Pajak dipergunakan untuk mencatat kewajiban perpajakan yang dipotong/dipunggut atas transaksi belanja yang dilakukan didalam Buku Pajak pada kolom penerimaan serta sebagai alat untuk mencatat penyetoran pajak ke kas

Negara sesuai dengan Undang-undang. Berikut ini penyajian Buku Pajak Desa Pongkar:

Tabel IV.5
Buku Pajak
Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
Tahun Anggaran 2018

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3	4	5	6
		1. Bidang Pembangunan			
1	20/12/2018	Terima Pajak PPh Pasal 22 dan 23 atas kegiatan Penimbunan Jl.Pemukiman RT 02/04	1.522.000		1.522.000
2	20/12/2018	Setor Pajak PPh Pasal 22 dan 23 atas kegiatan Penimbunan Jl.Pemukiman RT 02/04		1.522.000	
3	20/12/2018	Terima Pajak PPh Pasal 22 dan 23 atas kegiatan Drainase RT 04/02	3.777.000		3.777.000
4	20/12/2018	Setor Pajak PPh Pasal 22 dan 23 atas kegiatan Drainase RT 04/02		3.777.000	
		II. Bidang Pemberdayaan			
5	20/12/2018	Terima Pajak PPh Pasal 22 dan 23 kegiatan Pertanian membuat kompos	430.800		430.800
6	20/12/2018	Terima Pajak PPh Pasal 22 dan 23 kegiatan Pertanian membuat kompos		430.800	
JUMLAH			5.729.800	5.729.800	5.729.800

Sumber: Buku Pajak Desa Pongkar

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun telah membuat Buku Pajak sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

2. Tahap Penggolongan

Setelah dilakukan pencatatan tahap selanjutnya adalah mengelompokkan catatan ke dalam Buku Besar. Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun tidak membuat Buku Besar. Karena Bendahara Desa Pongkar belum memahami cara memposting transaksi pada Desa ke dalam Buku Besar. Berikut ini merupakan contoh Buku Besar yang seharusnya ditetapkan oleh Desa Pongkar.

Tabel IV.6
Buku Besar

Nama Akun: Kas di Bendahara Desa

Tanggal	Keterangan	R e f	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
01/10/2018	Penerimaan Transfer Dana Desa		23.280.000		23.280.000
12/10/2018	Penerimaan Transfer Dana Desa		1.528.000		24.808.000
12/10/2018	Penerimaan Transfer Dana Desa		6.906.443		31.714.443
01/10/2018	Belanja Pegawai			23.280.000	8.434.443
12/10/2018	Belanja Pegawai			1.528.000	6.906.443
12/10/2018	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			6.906.443	-

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020

Tabel IV.7
Buku Besar

Nama Akun: Pendapatan Transfer

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01/10/2018	Penerimaan Dana Transfer			23.280.000	23.280.000
12/10/2018	Penerimaan Dana Transfer			1.528.000	24.808.000
12/10/2018	Penerimaan Dana Transfer			6.906.443	31.714.443

Sumber : Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020

Tabel IV.8
Buku Besar

Nama Akun: Belanja Pegawai

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
01/10/2018	Gaji Pemdes bulan September		23.280.000		23.280.000
12/10/2018	Kegiatan Operasional BPD bulan Juli dan Agustus		1.528.000		24.808.000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020

Tabel IV.9
Buku Besar

Nama Akun: Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Tanggal	Keterangan	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo (Rp)
12/10/2018	Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga (Futsal)		6.906.443		6.906.443

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Pongkar kecamatan Tebing Kabupaten Karimun telah membuat Buku Besar sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

3. Tahap Pengikhtisaran

Pada tahap ini dilakukan pembuatan Neraca Saldo. Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun belum membuat Neraca Saldo karena Bendahara Desa belum memahami cara membuat Neraca Saldo. Berikut ini merupakan contoh Neraca Saldo yang dapat ditetapkan oleh Desa Pongkar.

Tabel IV.10
Neraca Saldo

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Kas di Bendahara Desa		-
Dana Desa		31.714.443
Belanja Bidang Pelaksana Pembangunan Desa		
1. Gaji Pemdes bulan September	23.280.000	
2. Kegiatan Operasional BPD bulan Juli dan Agustus	1.528.000	
3. Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga (Futsal)	6.906.443	
Jumlah	31.714.443	31.714.443

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penulis Tahun 2020

Setelah membuat Neraca Saldo, sebaiknya Desa Pongkar membuat Penyesuaian yang digunakan untuk menyajikan secara wajar terhadap aset yang dimiliki oleh Desa. Berikut ini merupakan contoh penyesuaian yang dapat ditetapkan oleh Desa Pongkar.

Sistem Pembayaran gaji pada umumnya dilakukan setiap bulan sekali. Namun pada Buku Kas Umum (lampiran 2) di bulan Februari, Desa tidak

4. Tahap Pelaporan

Tahap ini merupakan tahap akhir, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dilaksanakan menimbulkan transaksi pada Desa dan diakhir tahun Bendahara Desa membuat Laporan Realisasi Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dipisahkan berdasarkan sumber dana. Berikut ini merupakan Laporan yang dibuat oleh Desa Pongkar:

a. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang berisikan jumlah anggaran dan realisasi dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan dari Pemerintah Desa terkait dengan Alokasi Dana Desa untuk tahun anggaran tertentu dengan 3 Tahapan berdasarkan sumber pencairan dana.

TABEL IV.11
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
(ADD)
PEMERINTAH DESA PONGKAR
KECAMATAN TEBING
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN ANGGARAN 2018

PAGU ALOKASI DANA DESA Rp.1.169.841.200

KO DE REK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
1	Pendapatan				
1.1	Pendapatan Transfer				
1.1.3	Pendapatan Alokasi Dana Desa				
	Tahap 1	467.936.480	327.737.895	140.198.585	70%
2	Belanja				
2.1	Bidang Penyelenggara Pemerintah Desa	265.195.940	253.143.913	12.052.027	95%
	Bidang Pembangunan Desa	158.333.643	37.011.643	121.322.000	23%
	Bidang Pembinaan	23.131.500	14.725.500	6.400.000	70%

	Kemasyarakatan				
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	23.275.397	22.856.839	424.558	98%
	JUMLAH	467.936.480	327.737.895	140.198.585	70%

Sumber: Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Pongkar

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun telah membuat Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD)

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) yang berkaitan dengan penggunaan Dana Desa untuk tahun anggaran tertentu dengan 3 Tahapan berdasarkan sumber pencairan dana.

Tabel IV.12
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA (DD)
PEMERINTAH DESA PONGKAR
KECAMATAN TEBING
KABUPATEN KARIMUN
ANGGARAN 2018

PAGU DANA DESA Rp 799.135.400

KOD	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%	KET
1	Pendapatan					
1.1	Pendapatan Transfer					
1.1.3	Dana Desa					
		799.135.400	654.115.000	207.621.550	82%	
2	Belanja					
	Bidang Pembangunan Desa	626.087.000	572.775.000	53.312.000	91%	
1	Pembangunan Tambatan perahu RT02/01	294.980.000	294.980.000	-	100%	2 tahap

2	Penimbunan Jalan Pemukiman RT02/04	32.589.000	32.587.000	2.000	100%	
3	Drainase Dusun 1 RT04/02	50.330.000	50.330.000	-	100%	
4	TPT+ Penimbunan RT01/02	63.368.000	63.368.000	-	100%	
5	Drainase RT01/03	53.310.000	-	53.310.000	0%	
6	Drainase RT 02/04	50.170.000	50.170.000	-	100%	
7	Tembok Penahan Tanah RT 03/02	81.340.000	81.340.000	-	100%	

Sumber : Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) Desa Pongkar

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun telah membuat Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.

c. Laporan Kekayaan Milik Desa

Laporan ini berisikan selisih antara aset lancar, aset tidak lancar dan kewajiban Pemerintah Desa per 31 Desember tahun tertentu yang berfungsi untuk mengecek keakuratan dalam memposting akun ke dalam debit dan kredit. Adapun bentuk Laporan Kekayaan Milik Desa dalam format sebagai berikut:

Tabel IV.13
Laporan Kekayaan Milik Desa
Pemerintah Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun
31 Desember 20xx

Uraian	Tahun 20xx (Tahun periode pelaporan) Rp	Tahun 20xx (Tahun sebelumnya) Rp
1. Aset A. Aset Lancar 1. Kas Desa a. Rekening Kas Desa b. Uang Kas dibendahara Desa 2. Inventasi Jangka Pendek a. Deposito b. Dst... 3. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. Dst... 4. Persediaan a. Kertas Segel b. Meterai c. Dst...		
JUMLAH ASET LANCAR		
B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen a. Penyertaan Modal Pemerintah Desa b. Dst.. 2. Aset Tetap a. Tanah b. Peralatan dan Mesin c. Gedung dan Bangunan d. Jalan,Irigasi dan Jaringan e. Aset Tetap lainnya f. Kontruksi Dalam Pengerjaan 3. Dana Cadangan 4. Aset Tidak Lancar Lainnya		
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR		
JUMLAH AET (A+B)		
II. KEWAJIBAN		

C. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga 2. Utang Bunga 3. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang 4. Dst..		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
D. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG 1. Pinjaman Jangka Panjang 2. Dst		
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
JUMLAH KEWAJIBAN (A+B)		
JUMLAH KEKAYAAN BERSIH (I-II)		

31 Desember 20xx

(Kepala Desa)

Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten karimun tidak membuat Laporan Kekayaan Milik Desa. Aset yang dimiliki oleh Desa dicatat ke dalam Buku Inventaris dengan harga perolehan. Berikut ini penyajian Buku Inventaris Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun.

Tabel IV.14
BUKU INVENTARIS BARANG
DESA PONGKAR KECAMTAN TEBING
KABUPATEN KARIMUN

Nama Barang	Vol	Type	Bahan	Tahun	Asal Usul Barang	Harga
Kipas angin	1	Kdk	Besi	2009	Beli	600.000
Kursi plastik	8	Napolly top	Plastik	2011	Beli	55.000
Komputer	1	Acer	Plastik/besi	2012	Beli	3.500.000
Lemari arsip	1	Petisi	Kayu	2012	Hibah	-
Lemari arsip	1	Setingkat	Kayu	2012	Hibah	-
Papan pengumuman	1		Kayu	2012	Beli	400.000

Papan rekapitulasi	1		Kayu	2012	Beli	400.000
Meja komputer	1	Olympic	Plastik	2012	Hibah	-
Printer	1	Brother dcp j-100	Plastik	2013	Beli	1.350.000
Lemari besi	1	Apex	Besi	2013	Hibah	-
Tv	1	Sanyo		2013	Beli	1.500.000
Meja	4	Olympic	Kayu	2013	Beli	650.000
Meja	2	Uciwa	Kayu	2013	Hibah	-
Laptop	1	Acer	Besi/plastik	2013	Beli	3.700.000
Laptop	1	Hp	Besi/plastik	2013	Beli	3.700.000
Papan program pokok PKK	1		Kayu	2013	Beli	400.000
Komputer	1	Hp	Plastik/besi	2014	Beli	3.500.000
Cpu	1	Avaris	Plastik/besi	2014	Beli	-
Cpu	1	Hp	Plastik/besi	2014	Beli	-
Kursi putar	2		Almunium	2014	Beli	650.000
Komputer	1	Aoc	Plastik/besi	2015	Beli	4.000.000
Cpu	1	Futura neo	Plastik/besi	2015	Beli	-
Printer	1	Brother dcpp j-140w	Plastik	2015	Beli	2.000.000
Mikrofon	1		Besi	2018	Hibah	1.300.000
Mikrofon	1	Sony	Besi	2018	Hibah	250.000
Spiker aktif	1	Asatron		2018	Add	3.000.000
Laptop	1	Hp	Besi/plastik	2018	Add	4.700.000
Proyektor/infokus	1	Epson	Besi/plastik	2018	Add	6.330.000

Sumber : Buku Inventaris Desa Pongkar

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Pongkar hanya mencatat aset lancar sedangkan untuk aset tidak lancar seperti gedung dan jalan Desa Pongkar belum mencatat ke dalam Buku Inventaris. Buku Inventaris Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneliti dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten menggunakan dasar pencatatan (*cash basis*) dan sistem pencatatan (*single entry*).
2. Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten karimun belum menerapkan akuntansi yang berterima umum karena pihak Desa Pongkar tidak membuat Buku besar, Neraca Saldo dan Laporan Kekayaan Milik Desa.
3. Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa (DD) dan Buku Inventaris.

5.2 Saran

1. Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dapat melakukan pencatatan transaksi secara lengkap dan berurutan sesuai dengan siklus akuntansi yang dimulai dari tahap pencatatan, tahap penggolongan, tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan.
2. Sebaiknya Desa Pongkar Kecamatan Tebing kabupaten Karimun membuat buku besar pada tahap penggolongan dan neraca saldo untuk melakukan penyesuaian terhadap persediaan, melakukan penyusutan terhadap Aset Tetap agar informasi saldo akun mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

3. Sebaiknya Desa Pongkar Kecamatan Tebing kabupaten Karimun membuat Laporan Kekayaan Milik Desa untuk memudahkan informasi yang akan diberikan kepada yang membutuhkan informasi tersebut.
4. Desa Pongkar Kecamatan Tebing kabupaten karimun sebaiknya berpedoman pada Akuntansi Berterima Umum tentang Siklus Akuntansi dalam mengelola keuangan.
5. Desa Pongkar Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun dapat mengikuti pelatihan mengenai akuntansi keuangan desa untuk memudahkan dalam menyusun laporan keuangan desa sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Doddy Setiadi. 2015, Pedoman Asistensi Akuntansi Dana Desa. Jakarta: Kompartemen Asp.
- Halim, Abdul, & Muhammad Syam Kusufi. 2012. Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Kieso, Donald E, Jerry J.Weygandt, Terry D. Warfield. 2016. *Intermediate Accounting. IFRS Edition. Second Edition*. United States:WILEY
- Lubis, Arfan Ikhsan, 2011. Akuntansi Keperilakuan. Jakarta: Edward Tanujaya
- Mahmud, 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiamo, 2009. Akuntansi Sektor Publik.Yogyakarta: ANDI Yogyakarta
- Muindro Renyowijoyo, 2013. Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mulyadi, 2010. Sitem Akuntansi. Jakarta: Cetakan Kelima, Penerbit Salemba Empat.
- Pura, Rahman, 2013. Pengantar Akuntansi 1.Jakarta: Erlangga.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015.Akuntansi Dana Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Surasih, Eni. 2016. Pemerintahan Desa dan Implementasinya. Jakarta:Erlangga.
- Sutopo, Ariesto Hadi., Adrianus, Arief. 2010. Terampil mengolah Data Kualitatif dengan NVIVO. Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP.
- Warren, Carl S, JamesM Roeve, Jonathan E Duehae dkk. 2014, Pengantar Akuntansi. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 72. 2005, tentang Sumber Kedudukan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 6. 2017. Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau